



Sekretariat DPRD
Kota Semarang

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



Sekretariat DPRD Kota Semarang
Tahun 2025 – 2029

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini dapat tersusun.

Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunannya juga berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan. Selanjutnya Renstra ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Semarang.

Kami menyadari bahwa Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Diharapkan Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Semarang, 2025
Sekretaris DPRD Kota Semarang



MOCH IMRON, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda/(IV-c)
NIP 196701101986031003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABELiv

DAFTAR GAMBAR.....v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud Dan Tujuan..... 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG 7

2.1. Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD 7

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 7

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 12

2.1.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD 20

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 36

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sekretariat DPRD Kota Semarang 36

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya 37

2.2.3. Penentuan Isu-isu Strategis Sekretariat DPRD Kota Semarang
41

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 43

3.1. Tujuan dan Sasaran 43

3.2. Strategi dan Kebijakan..... 46

3.2.1. Strategi..... 46

3.2.2. Kebijakan 47

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 49

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah 49

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... 82

BAB V PENUTUP 84

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Sekretariat DPRD Tahun 2025 12

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan di Sekretariat DPRD Tahun 2025 12

Tabel 2. 3 Rincian Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Sekretariat DPRD 13

Tabel 2. 4 Gedung dan Bangunan Sekretariat DPRD Kota Semarang..... 19

Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2020-2024 20

Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2020-2024 23

Tabel 2. 7 Rumusan Masalah Sekretariat DPRD 36

Tabel 2. 8 Rumusan Isu Strategis Sekretariat DPRD..... 42

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD 45

Tabel 3. 2 Tahapan Strategi Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025-2029 47

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025-2029 48

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sekretariat DPRD 50

Tabel 4. 2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung program Prioritas Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025-2029 62

Tabel 4. 3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Semarang..... 63

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD..... 82

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci..... 83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Semarang..... 8



RENCANA STRATEGIS

Sekretariat DPRD **Kota Semarang**

TAHUN 2025-2029



PENDAHULUAN



GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG



TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang maka Sekretariat DPRD wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota, atas dasar tersebut maka Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan

lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Sekretariat DPRD Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengarustamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7)
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
21. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Sekretariat DPRD beserta pemangku kepentingan terkait dalam memfasilitasi dan memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD guna mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- a. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
- b. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya Bidang Legislasi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
- c. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
- d. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Semarang, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Semarang.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tentang tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. .

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.



RENCANA STRATEGIS

Sekretariat DPRD Kota Semarang

TAHUN 2025-2029

I PENDAHULUAN



**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN,
DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD
KOTA SEMARANG**



**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN**



**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**



PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

2.1. Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Semarang berdasarkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta sistem kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang sebagai berikut

a. Tugas Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan

b. Fungsi Sekretariat DPRD

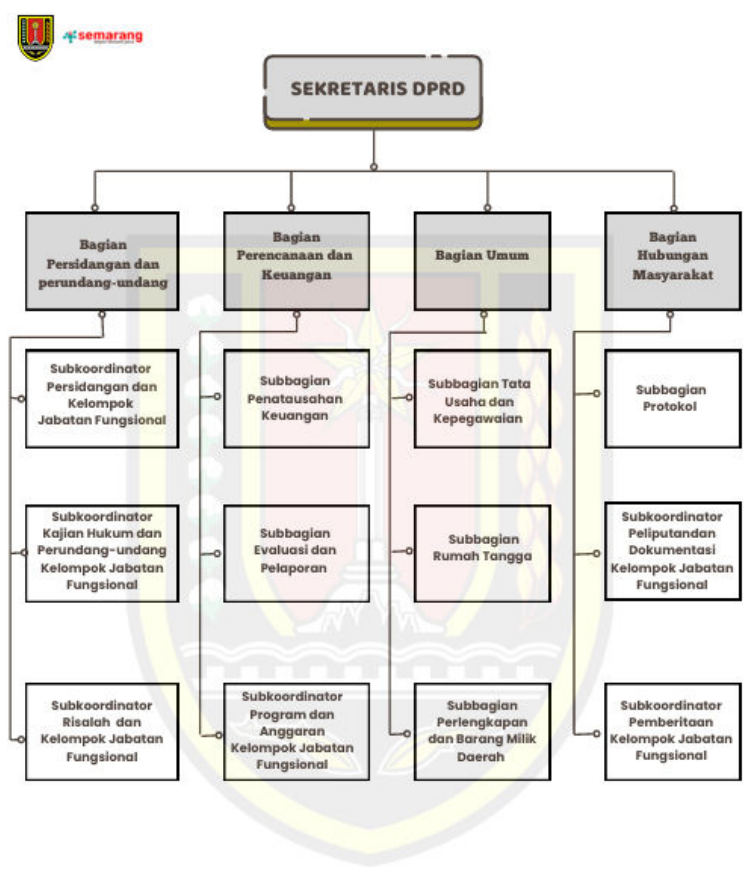
Dalam menjalankan tugas sekretariat DPRD Kota Semarang menyelenggarakan fungsi, antara lain :

1. Perumusan kebijakan Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, serta Bagian Hubungan Masyarakat;
2. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, serta Bagian Hubungan Masyarakat;
4. penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Sekretariat DPRD;
5. penyelenggaraan kerjasama Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, serta Bagian Hubungan Masyarakat;
6. penyelenggaraan kesekretariatan Sekretariat DPRD;

- 7. penyelenggaraan program dan kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, serta Bagian Hubungan Masyarakat;
- 8. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, serta Bagian Hubungan Masyarakat;
- 9. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- 10. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pada Sekretariat DPRD sesuai Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta sistem kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang. menyebutkan bahwa Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Semarang

d. Uraian Tugas dan Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta sistem kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang. Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

2. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Persidangan, Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, dan Risalah.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
- e. pelaksanaan kegiatan Persidangan, Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, dan Risalah;
- f. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
- g. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Program dan Anggaran, Penatausahaan Keuangan, dan Evaluasi dan Pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan anggaran, penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- g. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bagian Umum

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Subbagian Rumah Tangga, dan Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Daerah. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bagian Umum;

- e. pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Subbagian Rumah Tangga, dan Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Bagian Umum;
- g. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bagian Umum;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Subbagian Pemberitaan, Subbagian Peliputan dan Dokumentasi, dan Subbagian Protokol. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bagian Hubungan Masyarakat;
- e. pelaksanaan kegiatan pemberitaan, peliputan dan dokumentasi, dan Subbagian Protokol;
- f. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Bagian Hubungan Masyarakat;
- g. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bagian Hubungan Masyarakat;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Berdasarkan data kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Semarang pada Awal September 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 50 pegawai yang terdiri dari 25 pegawai laki-laki (50%) dan 25 pegawai perempuan (50%) .

Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Sekretariat DPRD Kota Semarang mayoritas memiliki tingkat pendidikan Sarjana sebanyak 24 pegawai (48%), untuk pendidikan S2 sebanyak 14 pegawai (28%), Diploma III sebanyak 7 pegawai (14%) dan jenjang SMA sebanyak 5 pegawai (10%). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan digram berikut:

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Sekretariat DPRD Tahun 2025

No	Jenjang Pendidikan	ASN	
		Jumlah Pegawai	Persentase terhadap seluruh pegawai
1	S2	14	28%
2	S1	24	48%
3	D3	7	14%
4	SMA	5	10%
Jumlah		49	100,00%
Jumlah ASN		49 pegawai	

Sumber : Sekretariat DPRD per 1 Juli 2025

Selanjutnya pegawai ASN bila dilihat dari golongan terdiri dari 38 PNS dan 11 PPPK. Pegawai golongan IV sebanyak 5 pegawai, pegawai golongan III sebanyak 27 pegawai dan pegawai golongan II sebanyak 6 pegawai. Selain itu terdapat pegawai PPPK dengan rincian golongan IX sebanyak 7 pegawai dan PPPK golongan VII sebanyak 4 pegawai. Secara rinci kondisi jumlah pegawai ASN berdasarkan Golongan di Sekretariat DPRD Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan di Sekretariat DPRD Tahun 2025

No	Golongan	Jumlah Pegawai	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
A	PNS	39	78%
1	Golongan IV	5	10 %
	IV/c	1	2%
	IV/b	2	4%

No	Golongan	Jumlah Pegawai	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
	IV/a	5	10%
2	Golongan III	27	54%
	III/d	4	8%
	III/c	6	12%
	III/b	6	12%
	III/a	9	18%
3	Golongan II	6	12%
	II/d	1	2%
	II/c	5	10%
B	PPPK	11	22%
1	IX	7	14%
2	VII	2	4%
3	V	2	4%

Sumber : Sekretariat DPRD per 1 Juli 2025

b. Sarana dan Prasarana (Asset)

Secara keseluruhan kepemilikan asset oleh sekretariat DPRD Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 sejumlah 898 jenis asset, dari keseluruhan tersebut dilihat dari kondisinya terdapat asset yang dalam kondisi baik dan juga ada asset yang perlu perbaikan-perbaikan. Uraian mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 3 Rincian Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Sekretariat DPRD

No	Kode	Keterangan	Total
1	1.3.2.05.002.006.017	Mic Conference	61
2	1.3.2.10.001.002.009	Tablet PC	61
3	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	56
4	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	49
5	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	43
6	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	37
7	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	30
8	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	26
9	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	23
10	1.3.2.02.001.001.003	Station Wagon	21
11	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	18

No	Kode	Keterangan	Total
12	1.3.2.05.002.004.001	Lemari Es	17
13	1.3.2.02.002.002.001	Sepeda	16
14	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	16
15	1.3.2.06.002.001.006	Handy Talky (HT)	16
16	1.3.2.10.002.003.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	16
17	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	15
18	1.3.2.05.003.006.004	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	14
19	1.3.2.04.001.004.005	Lemari Penyimpan	13
20	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	9
21	1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	9
22	1.3.2.06.001.002.061	Lensa Kamera	8
23	1.3.2.06.001.002.105	Layar Film/Projector	8
24	1.3.2.06.001.002.164	Alat Studio Video Lainnya	8
25	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	7
26	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	7
27	1.3.2.05.001.005.034	Display	7
28	1.3.2.05.002.001.008	Meja Rapat	7
29	1.3.2.05.002.006.004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7
30	1.3.2.05.002.006.008	Sound System	7
31	1.3.2.05.001.005.043	LCD Projector/Infocus	6
32	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	6
33	1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	6
34	1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	6
35	1.3.2.10.002.001.012	Hard Disk	6
36	1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya	5
37	1.3.2.05.002.001.014	Meja Resepsionis	5
38	1.3.2.05.002.004.007	Exhause Fan	5
39	1.3.2.05.003.002.011	Meja Tamu Biasa	5
40	1.3.2.06.001.002.126	Camera Digital	5
41	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	4
42	1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	4
43	1.3.2.05.002.001.016	Meja Tambahan	4

No	Kode	Keterangan	Total
44	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	4
45	1.3.2.05.002.006.012	Wireless	4
46	1.3.2.05.002.006.020	Stabilisator	4
47	1.3.2.05.002.007.001	Alat Pemadam/Portable	4
48	1.3.2.05.003.006.003	Kursi Tamu di Ruangan Ketua/Wakil Ketua DPRD	4
49	1.3.2.10.002.001.018	peralatan mainframe lainnya (dst)	4
50	1.3.2.10.002.002.010	Computer Compatible	4
51	1.3.2.05.001.003.007	Mesin Fotocopy Folio	3
52	1.3.2.05.001.003.017	Alat Reproduksi lainnya	3
53	1.3.2.05.001.005.002	CCTV - Camera Control Television System	3
54	1.3.2.05.001.005.019	Alat Pemotong Kertas	3
55	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	3
56	1.3.2.05.002.001.030	Kursi Rapat	3
57	1.3.2.05.002.005.002	Kompas Gas (Alat Dapur)	3
58	1.3.2.05.002.006.029	Gambar Presiden/Wakil Presiden	3
59	1.3.2.05.002.006.048	Handy Cam	3
60	1.3.2.05.003.003.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3
61	1.3.2.05.003.007.010	Lemari Arsip Pejabat lainnya	3
62	1.3.2.06.001.001.036	Microphone/Wireless MIC	3
63	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3
64	1.3.2.06.001.002.045	Tripod Camera	3
65	1.3.2.07.002.005.025	Alat Kesehatan Umum lainnya	3
66	1.3.2.10.002.004.001	Server	3
67	1.3.2.01.003.007.001	Mobil Workshop	2
68	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2
69	1.3.2.05.001.002.012	Mesin Penghitung Uang	2
70	1.3.2.05.001.004.020	Lemari Display	2
71	1.3.2.05.001.005.076	Papan Nama Instansi	2
72	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	2
73	1.3.2.05.002.004.005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2
74	1.3.2.05.002.006.015	Microphone Floor Stand	2
75	1.3.2.05.002.006.069	Lampu	2

No	Kode	Keterangan	Total
76	1.3.2.05.003.001.003	Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	2
77	1.3.2.05.003.001.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2
78	1.3.2.05.003.002.008	Meja Tamu Ruangan Tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD	2
79	1.3.2.05.003.002.014	Meja Rapat Pejabat lainnya	2
80	1.3.2.05.003.003.003	Kursi Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	2
81	1.3.2.05.003.004.007	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	2
82	1.3.2.05.003.005.003	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	2
83	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2
84	1.3.2.06.001.001.096	peralatan studio audio lainnya (dst)	2
85	1.3.2.06.001.002.034	Teleprompter	2
86	1.3.2.06.001.002.044	Digital Video Effect	2
87	1.3.2.06.001.002.060	Camera Film	2
88	1.3.2.06.002.001.010	Facsimile	2
89	1.3.2.08.001.056.081	Meja Kerja	2
90	1.3.2.10.001.001.008	Komputer Jaringan lainnya	2
91	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	2
92	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	1
93	1.3.2.02.001.001.001	Sedan	1
94	1.3.2.03.002.001.005	R O L	1
95	1.3.2.03.002.003.004	perkakas bengkel service lainnya (dst)	1
96	1.3.2.03.002.012.028	Mesin Bor Listrik Tangan	1
97	1.3.2.04.001.005.004	Alat Pengukur Temperatur	1
98	1.3.2.05.001.001.004	Mesin Ketik Listrik	1
99	1.3.2.05.001.002.001	Mesin Hitung Manual	1
100	1.3.2.05.001.005.008	Copy Board/Elektric White Board	1
101	1.3.2.05.001.005.010	Alat Penghancur Kertas	1
102	1.3.2.05.001.005.012	Mesin Absensi	1
103	1.3.2.05.001.005.032	White Board Electronic	1
104	1.3.2.05.001.005.077	Papan Pengumuman	1
105	1.3.2.05.001.005.078	Papan Tulis	1
106	1.3.2.05.002.001.012	Meja Telepon	1
107	1.3.2.05.002.001.013	Meja Podium	1

No	Kode	Keterangan	Total
108	1.3.2.05.002.001.017	Meja Panjang	1
109	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	1
110	1.3.2.05.002.001.033	Kursi Biasa	1
111	1.3.2.05.002.002.001	Jam Mekanis	1
112	1.3.2.05.002.003.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1
113	1.3.2.05.002.003.007	Alat Pembersih lainnya	1
114	1.3.2.05.002.004.002	A.C. Sentral	1
115	1.3.2.05.002.004.006	Kipas Angin	1
116	1.3.2.05.002.004.015	Alat Pendingin lainnya	1
117	1.3.2.05.002.005.005	Rice Cooker (Alat Dapur)	1
118	1.3.2.05.002.006.007	Loudspeaker	1
119	1.3.2.05.002.006.014	Microphone	1
120	1.3.2.05.002.006.018	Unit Power Supply	1
121	1.3.2.05.002.006.033	Pataka	1
122	1.3.2.05.002.006.039	Mimbar/Podium	1
123	1.3.2.05.002.006.068	Tangga	1
124	1.3.2.05.002.007.017	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1
125	1.3.2.05.003.001.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1
126	1.3.2.05.003.002.003	Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	1
127	1.3.2.05.003.002.004	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1
128	1.3.2.05.003.003.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1
129	1.3.2.05.003.003.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1
130	1.3.2.05.003.004.003	Kursi Rapat Ruangan Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	1
131	1.3.2.05.003.004.004	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	1
132	1.3.2.05.003.004.005	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	1
133	1.3.2.06.001.001.001	Audio Mixing Console	1
134	1.3.2.06.001.001.035	Modulation Monitor Speaker Kabaret	1
135	1.3.2.06.001.001.037	Microphone/Boom Stand	1
136	1.3.2.06.001.001.042	Audio Master Control Unit	1
137	1.3.2.06.001.001.064	Chairman/Audio Conference	1
138	1.3.2.06.001.001.075	Digital Audio Taperecorder	1

No	Kode	Keterangan	Total
139	1.3.2.06.001.001.078	Microphone Cable	1
140	1.3.2.06.001.002.015	Video Mixer	1
141	1.3.2.06.001.002.024	Video Processor	1
142	1.3.2.06.001.002.053	DC Converter	1
143	1.3.2.06.001.002.128	Lampu Blitz Kamera	1
144	1.3.2.06.001.002.130	Video Conference	1
145	1.3.2.06.001.004.003	Mesin Cetak Listrik Sheet	1
146	1.3.2.06.001.004.014	Mesin Jilid	1
147	1.3.2.06.002.001.003	Pesawat Telephone	1
148	1.3.2.06.002.001.004	Telephone Mobile	1
149	1.3.2.06.002.001.022	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	1
150	1.3.2.06.002.002.004	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	1
151	1.3.2.06.002.006.003	Slide Projector (Lapangan)	1
152	1.3.2.08.001.011.018	Vacum Pump	1
153	1.3.2.08.007.003.001	Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran)	1
154	1.3.2.09.004.009.135	Set of Studio Lights	1
155	1.3.2.10.001.003.001	Komputer Unit Lainnya	1
156	1.3.2.10.002.001.006	CPU (Peralatan Mainframe)	1
157	1.3.2.10.002.001.013	Keyboard (Peralatan Mainframe)	1
158	1.3.2.10.002.002.017	Peralatan Minikomputer lainnya	1
159	1.3.2.10.002.003.002	Monitor	1
160	1.3.2.10.002.003.017	External/ Portable Hardisk	1
161	1.3.2.10.002.003.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	1
162	1.3.2.10.002.004.004	Modem	1
163	1.3.2.10.002.004.033	Peralatan Jaringan lainnya	1
164	1.3.2.15.004.005.006	Air Conditioning (AC)	1

Sumber : Sekretariat DPRD per 1 Juli 2025

Selain pada inventarisasi sarana dan prasarana milik Sekretariat DPRD Kota Semarang, peninjauan aset dinas juga dilakukan pada aset tanah dan bangunan yang dimiliki. Berikut merupakan tabel aset tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kota Semarang

Tabel 2. 4 Gedung dan Bangunan Sekretariat DPRD Kota Semarang

JENIS BARANG	KONDISI	LUAS LANTAI	ALAMAT	STATUS	ASAL USUL	HARGA
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik		Jl. Pemuda No.146, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132	Milik Pemda		

2.1.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Sekretariat DPRD Kota Semarang:

a. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Semarang

Tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan pendukung yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
A	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra Sekretariat DPRD 2021-2026																
1.	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD	%	90	90	95	95	95	88,61	89,72	80	87,51	90	98,46%	99,69%	94,39%	92,12%	94,74%
2.	Persentase Raperda menjadi Perda	%	76.47	82.35	88.35	94.12	94.12	65,75	63,33	53,33	62,5	62,5	85,98%	76,90%	60,36%	66,40%	66,40%
3.	Nilai SAKIP OPD	Nilai	77,94	79,94	81	82	82	72,25	72,98	73,86	77,15	79,1	92,70%	91,29%	91,19%	91,22%	93,06%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
B	IKD RPJMD dan IKU Sekretariat DPRD																	
1.	Tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD dalam fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
C	Indikator Program Sekretariat DPRD																	
1.	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	dokumen	12	14	14	14	14	8	10	3	9	8	66,67%	71,42%	21,43%	64,28%	57,14%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase peningkatan kemampuan ASN Sekretariat DPRD	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat DPRD

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Sekretariat DPRD mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Sekretariat DPRD. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Sekretariat DPRD:

Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	Anggar an	Real isasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SEKRETARIAT DPRD	106.853.888.979	110.584.942.044	115.222.268.665	109.634.147.228	135.206.559.595	76.828.235.002	78.401.083.512	97.741.272.977	95.945.704.838	105.019.523.699	71,90 %	70,70 %	84,83 %	87,51 %	77,67 %	10,23%	34%
4.02.02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	45.391.800.875	52.017.465.022	51.471.664.203	41.328.850.638	60.335.866.803	22.148.982.888	25.194.418.957	36.871.229.377	31.585.417.808	36.577.940.814	48,80 %	48,43 %	71,63 %	76,42 %	60,62 %	33,17%	62%
4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	16.103.923.100	17.893.247.889	14.293.853.660	8.858.545.134	12.362.909.600	4.912.246.708	5.458.051.898	7.670.597.035	5.906.899.100	7.256.182.899	30,50 %	30,50 %	53,66 %	66,68 %	58,69 %	88,20%	51%
4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	16.103.923.100	17.893.247.889	14.293.853.660	8.858.545.134	12.362.909.600	4.912.246.708	5.458.051.898	7.670.597.035	5.906.899.100	7.256.182.899	30,50 %	30,50 %	53,66 %	66,68 %	58,69 %	88,20%	51%

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	Anggar an	Real isasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	8.544.35 8.066	12.686.1 53.441	13.771.9 80.524	11.794.7 94.195	14.954.2 30.412	8.152.78 3.104	8.855.57 9.116	12.484.6 77.362	9.622.50 6.600	10.093. 734.682	95,42 %	69,81 %	90,65 %	81,58 %	67,50 %	24,25%	32%
4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8.544.35 8.066	9.493.73 1.184	10.353.5 17.224	8.412.61 8.895	11.065.8 56.610	5.705.94 8.250	6.339.94 2.500	9.497.91 3.376	6.584.50 0.000	6.773.0 97.525	66,78 %	66,78 %	91,74 %	78,27 %	61,21 %	0,89%	33%
4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2868643 620	3.187.38 1.800	2.618.46 3.300	2.620.57 5.300	2.875.63 2.584	2260427 954	2.511.58 6.616	2.292.13 6.176	2.305.34 9.100	2.362.1 71.637	78,80 %	78,80 %	87,54 %	87,97 %	82,14 %	4,96%	5%
4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1950170 00	5.040.45 7	800.000. 000	761.600. 000	1.012.74 1.218	186.406. 900	4.050.00 0	694.627. 810	732.657. 500	958.465 .520	95,58 %	80,35 %	86,83 %	96,20 %	94,64 %	1,30%	1699 0%
4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4457414 618	4.952.68 2.909	6.078.06 7.368	6.463.63 3.544	5.201.58 7.411	3.184.79 9.031	3.538.66 5.590	5.803.08 3.470	6.339.92 4.120	4.713.8 38.762	71,45 %	71,45 %	95,48 %	98,09 %	90,62 %	28,75%	59%
4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	4457414 618	4.952.68 2.909	6.078.06 7.368	6.463.63 3.544	5.201.58 7.411	3184799 031	3.538.66 5.590	5.803.08 3.470	6.339.92 4.120	4.713.8 38.762	71,45 %	71,45 %	95,48 %	98,09 %	90,62 %	28,75%	59%
4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	16.286.1 05.091	16.485.3 80.783	17.327.7 62.651	14.211.8 77.765	27.817.1 39.380	5.899.15 4.045	7.342.12 2.353	10.912.8 71.510	9.716.08 7.988	14.514. 184.471	36,22 %	44,54 %	62,98 %	68,37 %	52,18 %	49,24%	112%

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	Anggar an	Reali sasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	15.882.3 08.091	14.483.9 76.784	15.290.4 43.151	11.662.3 73.766	24.886.4 59.955	5.707.55 8.145	6.341.73 1.272	8.922.90 1.010	7.678.26 9.988	12.410. 626.231	35,94 %	43,78 %	58,36 %	65,84 %	49,87 %	43,68%	99%
4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	403.797. 000	2.001.40 3.999	2.037.31 9.500	2.549.50 3.999	2.930.67 9.425	191.595. 900	1.000.39 1.081	1.989.97 0.500	2.037.81 8.000	2.103.5 58.240	47,45 %	49,98 %	97,68 %	79,93 %	71,78 %	72,39%	527%
4.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	61.462.0 88.105	58.867.4 77.022	63.750.6 04.462	68.305.2 96.590	74.870.6 92.792	54.679.2 52.113	53.206.6 64.555	60.870.0 43.600	64.360.2 87.030	68.441. 582.885	88,96 %	90,38 %	95,48 %	94,22 %	91,41 %	2,94%	24%
4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.225.0 00	66.851.8 55	35.214.6 20	33.012.4 94	82.424.8 00	76.339.5 00	48.737.3 50	18.816.0 50	30.735.7 00	73.014. 100	83,68 %	72,90 %	53,43 %	93,10 %	88,58 %	29,80%	103%
4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.968.0 00	14.339.8 80	10.000.0 00	10.128.6 74	39.063.2 00	19.393.0 00	11.770.0 00	8.307.30 0	10.092.0 00	38.373. 600	92,49 %	82,08 %	83,07 %	99,64 %	98,23 %	8,49%	233%

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	Anggar an	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	8.599.25 0	5.940.93 7	3.220.88 0	3.117.28 0	3.033.80 0	7.629.87 5	2.970.25 0	1.255.00 0	3.112.00 0	2.977.5 00	88,73 %	50,00 %	38,96 %	99,83 %	98,14 %	88,80%	25%
4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	8.599.25 0	5.940.93 7	3.213.56 2	3.199.03 0	3.033.80 0	7.629.87 5	4.523.00 0	1.728.00 0	3.194.00 0	2.930.0 00	88,73 %	76,13 %	53,77 %	99,84 %	96,58 %	38,84%	-26%
4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	8.599.25 0	5.863.59 9	9.877.38 0	8.392.48 0	8.316.60 0	7.629.87 5	5.691.00 0	2.501.75 0	6.649.50 0	105.000	88,73 %	97,06 %	25,33 %	79,23 %	1,26 %	49,90%	-14%
4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.599.25 0	5.940.93 7	3.213.56 2	3.199.03 0	3.033.80 0	7.629.87 5	4.826.50 0	1.948.00 0	3.194.00 0	2.979.8 00	88,73 %	81,24 %	60,62 %	99,84 %	98,22 %	29,26%	-39%
4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.570.0 00	18.862.0 20	3.777.71 6	3.064.48 0	3.033.80 0	23.710.0 00	16.317.0 00	2.976.00 0	2.654.30 0	2.975.4 00	86,00 %	86,51 %	78,78 %	86,62 %	98,08 %	14,84%	- 112%

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	Anggar an	Reali sasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	8.290.00 0	9.963.54 5	1.911.52 0	1.911.52 0	22.909.8 00	2.717.00 0	2.639.60 0	100.000	1.839.90 0	22.672. 800	32,77 %	26,49 %	5,23%	96,25 %	98,97 %	1643,3 0%	2773 %
4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7250405 202	7.836.58 7.944	6.977.11 0.529	7.258.57 2.348	7.620.67 0.210	6951910 096	7.301.50 4.785	6.639.79 4.551	6.889.48 4.032	7.415.6 92.602	95,88 %	93,17 %	95,17 %	94,92 %	97,31 %	1,57%	7%
4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6932765 202	7.297.64 7.581	6.614.62 0.977	6.934.71 9.086	7.255.19 5.000	6653822 596	7.004.02 3.785	6.317.14 8.551	6.585.51 0.032	7.101.3 58.102	95,98 %	95,98 %	95,50 %	94,96 %	97,88 %	2,01%	8%
4.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	317.640. 000	538.940. 363	362.489. 552	321.351. 982	363.095. 610	298.087. 500	272.481. 000	322.646. 000	301.870. 000	312.507 .500	93,84 %	50,56 %	89,01 %	93,94 %	86,07 %	27,08%	7%
4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	0	1.008.00 0	1.055.00 0	-	-	-	932.000	526.800	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	92,46 %	49,93 %	#DIV/0!	#DIV/ 0!
4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	0	1.493.28 0	1.324.60 0	-	-	-	1.172.00 0	1.300.2 00	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	78,48 %	98,16 %	#DIV/0!	#DIV/ 0!

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	Anggar an	Real isasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	0	0	50.000.0 00	70.000.0 00	0	0	0	48.000.0 00	52.412. 500	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	96,00 %	74,88 %	#DIV/0!	#DIV/ 0!
4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0	50.000.0 00	70.000.0 00	-	-	-	48.000.0 00	52.412. 500	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	96,00 %	74,88 %	#DIV/0!	#DIV/ 0!
4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	312.000. 000	217.000. 000	423.300. 000	453.000. 000	723.000. 000	209.680. 000	192.700. 000	353.650. 000	321.970. 000	527.603 .000	67,21 %	88,80 %	83,55 %	71,08 %	72,97 %	13,96%	130%
4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	312.000. 000	217.000. 000	423.300. 000	453.000. 000	723.000. 000	209.680. 000	192.700. 000	353.650. 000	321.970. 000	527.603 .000	67,21 %	88,80 %	83,55 %	71,08 %	72,97 %	13,96%	130%
4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.692.69 7.458	4.257.82 5.293	5.672.55 9.792	6.528.29 3.330	5.968.75 6.171	3.130.66 7.675	3.120.07 1.690	4.712.04 4.207	5.365.00 8.062	5.288.7 66.467	66,71 %	73,28 %	83,07 %	82,18 %	88,61 %	29,95%	63%
4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.268.0 00	50.265.9 00	50.000.0 00	50.000.0 00	110.000. 000	50.175.9 70	45.649.6 50	45.431.0 00	48.389.5 00	109.184 .160	99,82 %	90,82 %	90,86 %	96,78 %	99,26 %	0,11%	123%

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	Anggar an	Reali sasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3944664 52,8	415.227. 845	417.627. 845	417.627. 845	407.327. 845	2896984 15	304.945. 700	357.307. 195	370.158. 082	384.482 .052	73,44 %	73,44 %	85,56 %	88,63 %	94,39 %	26,59%	30%
4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5447432 81	573.413. 980	473.413. 980	390.162. 872	473.413. 980	2941363 82,8	309.617. 245	388.395. 340	312.345. 350	413.697 .213	54,00 %	54,00 %	82,04 %	80,06 %	87,39 %	58,68%	44%
4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	186.133. 000	214.999. 700	310.797. 400	323.617. 400	427.664. 450	171.260. 500	149.868. 500	197.127. 000	250.280. 690	329.211 .000	92,01 %	69,71 %	63,43 %	77,34 %	76,98 %	- 11,78%	78%
4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	353.216. 000	357.646. 268	274.080. 551	339.944. 180	241.792. 596	307.498. 000	197.985. 365	210.159. 854	220.728. 600	213.554 .077	87,06 %	55,36 %	76,68 %	64,93 %	88,32 %	22,81%	-28%
4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.256.48 5.000	1.638.66 5.240	1.894.57 7.156	3.300.66 1.353	2.877.98 7.240	1.618.05 4.183	1.631.07 2.270	1.865.21 3.300	3.031.51 2.548	2.864.5 33.560	71,71 %	99,54 %	98,45 %	91,85 %	99,53 %	39,38%	72%
4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	907.385. 724	1.008.20 6.360	2.252.06 2.860	1.706.27 9.680	1.430.57 0.060	399.844. 224	444.271. 360	1.648.41 0.518	1.131.59 3.292	974.104 .405	44,07 %	44,07 %	73,20 %	66,32 %	68,09 %	59,38%	237%

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	Anggar an	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.550.58 6.055	2.597.88 1.790	3.946.38 1.849	1.867.50 5.673	4.479.77 6.412	2.405.76 4.707	2.008.25 2.000	3.694.48 1.220	1.680.70 6.064	4.037.6 77.000	67,76 %	77,30 %	93,62 %	90,00 %	90,13 %	31,48%	153%
4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.268.05 5.000	550.650. 000	1.197.07 6.729	604.880. 552	3.293.65 5.428	848.151. 850	501.288. 000	1.184.76 0.000	582.458. 586	2.924.4 40.000	66,89 %	91,04 %	98,97 %	96,29 %	88,79 %	34,32%	447%
4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7552430 55	839.158. 950	2.040.32 3.572	996.878. 892	732.076. 596	4591233 00	510.137. 000	1.825.81 3.220	848.844. 478	689.280 .000	60,79 %	60,79 %	89,49 %	85,15 %	94,15 %	52,93%	197%
4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.527.28 8.000	1.208.07 2.840	708.981. 548	265.746. 229	454.044. 388	1.098.48 9.557	996.827. 000	683.908. 000	249.403. 000	423.957 .000	71,92 %	82,51 %	96,46 %	93,85 %	93,37 %	28,41%	-34%
4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.451.70 0.000	2.610.43 1.256	2.555.96 3.367	2.637.71 4.256	2.634.55 5.949	6.129.23 5.670	2.301.57 2.210	2.454.18 8.963	2.564.79 1.707	2.555.1 73.466	82,25 %	88,17 %	96,02 %	97,24 %	96,99 %	17,11%	-52%
4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.914.00 0	12.145.0 00	28.445.0 00	20.000.0 00	22.477.6 93	7.800.00 0	11.130.0 00	21.730.0 00	19.990.0 00	22.460. 000	87,50 %	91,64 %	76,39 %	99,95 %	99,92 %	18,90%	142%

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	Anggar an	Real isasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	205.807.000	167.162.256	167.162.256	152.462.256	167.162.256	91.113.540	63.903.456	87.854.711	91.186.707	91.913.466	44,27 %	38,23 %	52,56 %	59,81 %	54,98 %	29,56%	12%
4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.236.979.000	2.431.124.000	2.360.356.111	2.465.252.000	2.444.916.000	6.030.322.130	2.225.538.754	2.344.604.252	2.453.615.000	2.440.800.000	83,33 %	91,54 %	99,33 %	99,53 %	99,83 %	18,87%	-54%
4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3010341748	2.523.974.826	2.215.350.560	1.996.378.090	2.344.516.110	2386232316	1.549.813.193	1.859.232.958	1.776.811.499	1.793.723.397	79,27 %	61,40 %	83,93 %	89,00 %	76,51 %	6,15%	-19%
4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1055777148	1.111.344.366	890.000.000	938.500.000	1.063.500.000	563830892,9	593.506.203	697.808.939	793.133.050	679.758.462	53,40 %	53,40 %	78,41 %	84,51 %	63,92 %	30,23%	22%
4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.000.000	340.014.560	340.014.560	269.693.340	333.577.247	61.640.000	214.922.600	250.072.000	234.166.670	230.535.450	97,84 %	63,21 %	73,55 %	86,83 %	69,11 %	- 21,39%	257%

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	Anggar an	Real isasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5033556 00	559.284. 000	561.044. 000	561.044. 000	636.649. 000	4842774 81	538.086. 090	544.923. 362	541.463. 079	598.511 .945	96,21 %	96,21 %	97,13 %	96,51 %	94,01 %	-2,27%	22%
4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.388.20 9.000	513.331. 900	424.292. 000	227.140. 750	310.789. 863	1.276.48 3.942	201.295. 100	366.428. 657	208.048. 700	284.917 .540	91,95 %	39,21 %	86,36 %	91,59 %	91,68 %	69,03%	-8%
4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	3343586 1622	37.306.9 57.358	39.992.3 43.101	45.592.3 20.399	49.058.4 93.140	31.764.0 68.541	35.541.8 45.828	39.776.3 22.651	43.803.5 84.987	45.264. 996.872	95,00 %	95,27 %	99,46 %	96,08 %	92,27 %	-2,68%	37%
4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	3269406 1593	36.326.7 35.103	39.083.5 00.131	44.449.9 62.864	47.879.9 59.000	31.059.3 58.513	34.838.5 03.013	39.016.3 64.751	42.942.3 01.987	44.311. 161.872	95,00 %	95,90 %	99,83 %	96,61 %	92,55 %	-2,39%	37%
4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	7418000 29,5	824.222. 255	908.842. 970	1.142.35 7.535	1.178.53 4.140	704.710. 028	593.845. 000	759.957. 900	861.283. 000	953.835 .000	95,00 %	72,05 %	83,62 %	75,40 %	80,93 %	- 10,59%	36%
4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	108.229. 000	156.000. 000	-	-	-	108.229. 000	109.497. 815	-	-	-	100,0 0%	70,19 %	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	#DIV/0!	#DIV/ 0!

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	2020 I	2021 II	2022 III	2023 IV	2024 V	Anggar an	Reali sasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	1.667.27 1.020	1.149.96 6.700	1.932.38 0.644	1.888.50 0.000	1.888.50 0.000	1.625.35 3.609	1.144.16 7.499	1.361.51 3.000	1.879.19 4.979	1.432.5 23.481	97,49 %	99,50 %	70,46 %	99,51 %	75,86 %	-9,66%	4%
4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.667.27 1.020	1.149.96 6.700	1.932.38 0.644	1.888.50 0.000	1.888.50 0.000	1.625.35 3.609	1.144.16 7.499	1.361.51 3.000	1.879.19 4.979	1.432.5 23.481	97,49 %	99,50 %	70,46 %	99,51 %	75,86 %	-9,66%	4%

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Semarang, 2025

c. Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi diantaranya

- 1) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Dalam laman ini memuat informasi terkait dengan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Peraturan DPRD yang dapat diakses pada alamat <https://jdih.dprd.semarangkota.go.id>
- 2) Dhayoh-e merupakan Aplikasi yang dibuat Sebagai Media Komunikasi Digital DPRD Kota Semarang dengan DPRD Kabupaten / Kota Dan Instansi pemerintah Se Indonesia. Tentunya hal ini memudahkan dalam mengatur dan mengetahui kehadiran tamu yang akan berkunjung ke DPRD Kota Semarang secara sistematis
- 3) Secara rutin DPRD Kota Semarang menyapa masyarakat lewat media cetak, media online, radio, dan televisi . Dalam beberapa kesempatan tersebut, DPRD Kota Semarang mengangkat issue yang sedang hangat di masyarakat. Misalnya permasalahan Pendidikan, Kesehatan dan Pemahaman terhadap fungsi Legislatif. Ini merupakan salah satu bagian dari bentuk tanggung jawab DPRD Kota Semarang dalam melaporkan hasil kerjanya kepada masyarakat. Media sosial juga digunakan DPRD Kota Semarang untuk berinteraksi dengan masyarakat. Penggunaan media sosial Instagram, dan Youtube sangat populer dikalangan generasi milenial. Lewat berbagai media sosial tersebut, DPRD Kota Semarang bisa menjangkau kalangan generasi milenial yang juga menjadi bagian dari konstituen mereka. Masyarakat juga bisa menyampaikan kegiatan DPRD Kota Semarang lewat TV Parlemen D-TV. Agenda kegiatan DPRD, termasuk rapat-rapat, disarankan secara live streaming lewat akun Youtube DPRD Kota Semarang. Lewat inovasi ini, masyarakat bisa menyaksikan dan mengawasi secara langsung kinerja wakil-wakil mereka di parlemen.

d. Penghargaan Perangkat Daerah

Pada bulan Juli Tahun 2024, Sekretariat DPRD Kota Semarang pada tahun 2024 ini memperoleh penghargaan sebagai Terbaik Kedua

Tingkat Jawa Tengah dalam Lomba Pengelolaan JDIH (Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum) yang diserahkan langsung oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Purn Drs. Nana Sudjana, A.S didampingi oleh Kepala Pusat JDIHN Kementerian Hukum dan HAM RI, Jonny P. Simamora kepada Sekretaris DPRD Kota Semarang Moch Imron, S.H., M.H.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi memfasilitasi pelaksanaan Tugas DPRD, Tantangan Sekretariat DPRD sebagai berikut :

- 1) Tahun 2025 merupakan tahun pertama pengabdian secara penuh bagi Anggota DPRD yang terpilih dalam pemilihan 2024. Tentunya program-program dan janji-janji politik dalam kampanye berusaha untuk direalisasikan. Hal ini tentunya diperlukan harmonisasi antara Eksekutif dan Legislatif untuk pelaksanaannya.
- 2) Selain itu, pelantikan Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Serentak Tahun 2024 juga akan dilaksanakan pada tahun 2025. Hal ini tentunya diperlukan harmonisasi antara Eksekutif dan Legislatif untuk dalam pelaksanaan janji-janji politik Kepala Daerah.
- 3) Perkembangan Kota Semarang sebagai salah satu Kota Besar di Indonesia tentunya harus diikuti dengan regulasi-regulasi yang mendukung iklim investasi sehingga memudahkan calon investor untuk menanamkan modalnya di Kota Semarang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi memfasilitasi pelaksanaan Tugas DPRD, Peluang Sekretariat DPRD sebagai berikut

- 1) Dengan penerapan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Realisasi Keuangan Sekretariat DPRD Kota Semarang berpeluang untuk meningkat secara signifikan. Hal ini karena selisih lebih dari anggaran perjalanan dinas yang selama ini menjadi salah satu faktor dominan silpa akan termaksimalkan dalam penyerapan;
- 2) Periode baru 2024-2029 diharapkan membawa semangat baru bagi DPRD Kota Semarang dalam mewakili masyarakat dalam menyuarakan aspirasi masyarakat;
- 3) Pengoptimalan fungsi JDIH Sekretariat DPRD Kota Semarang. Terdokumentasikannya peraturan-peraturan yang sistematis dan lengkap merupakan salah satu indikator tercapainya pelayanan

Sekretariat DPRD kepada DPRD Kota Semarang. Sehingga harapannya adalah JDIH Sekretariat DPRD Kota Semarang mendapat penghargaan dalam pengelolaan JDIH tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat DPRD Kota Semarang.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Semarang

Sebagaimana dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta sistem kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Sekretariat DPRD, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Semarang yaitu “Belum optimalnya kapasitas kinerja Anggota DPRD” yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut :

Tabel 2. 7 Rumusan Masalah Sekretariat DPRD

No	Masalah Utama OPD	Permasalahan OPD	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya kapasitas kinerja Anggota DPRD	Belum optimalnya penyelenggaraan persidangan dan perundang-undangan	• Belum optimalnya penyelenggaraan persidangan • Belum optimal kualitas kajian hukum dan perundang-undangan • Belum optimalnya kualitas risalah
		Belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan dan pengelolaan keuangan	• Belum optimalnya kinerja penatausahaan keuangan • Belum optimalnya kinerja perencanaan keuangan • Belum optimalnya kinerja evaluasi dan pelaporan

No	Masalah Utama OPD	Permasalahan OPD	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Belum optimalnya penyelenggaraan layanan umum	• Belum optimalnya kinerja tata usaha dan kepegawaian • Belum optimalnya kinerja rumah tangga • Belum optimalnya kinerja pengelolaan Aset dan BMD
		Belum optimalnya penyelenggaraan layanan kehumasan	• Belum optimalnya kinerja publikasi dan dokumentasi • Belum optimalnya kinerja keprotokolan • Belum optimalnya kualitas kinerja pemberitaan

Berdasarkan uraian diatas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan layanan Sekretariat DPRD dapat dirincikan bahwa terdapat 4 permasalahan OPD dengan 12 Akar masalah.

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045,” Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan sarana prasarana; serta kesinambungan pembangunan.

Di dalam RPJMN dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita.

Berikut delapan prioritas nasional tersebut :

1. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

“Untuk pencapaian sasarannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah (pemda), dan badan usaha (BUMN, swasta),” disebutkan dalam lampiran Perpres 12/ 2025.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pmda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Wali Kota

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

“Kota Semarang menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif”

Pokok Visi keempat : Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif

Misi Ketujuh : Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas

Tujuan ketujuh : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat .

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil, melalui indikator Nilai SAKIP, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Indeks Integritas Nasional.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, melalui indikator Indeks Pelayanan Publik.
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang, diukur melalui persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sekretariat DPRD secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam mencapai indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

- c. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS menjadi dokumen yang terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah yang memuat integrasi pertimbangan lingkungan untuk memastikan bahwa aspek lingkungan dan pembangunan keberlanjutan telah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Kota Semarang.

Dalam konteks tata kelola kelembagaan di Kota Semarang, permasalahan strategis belum optimalnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan, termasuk DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pelayanan yang belum maksimal juga

menimbulkan risiko ketidakadilan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta potensi penyalahgunaan wewenang.

Isu strategis dalam KLHS perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik demokratis, dan bertanggung jawab. Prinsip good governance meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum yang harus diwujudkan secara konsisten dalam tata kelola kelembagaan DPRD maupun Sekretariat DPRD. Meskipun tidak secara langsung memberikan pelayanan publik kepada masyarakat umum, kualitas kerja Sekretariat DPRD sangat menentukan efektivitas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan tiga fungsi utamanya: Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. Ketiga fungsi ini merupakan instrumen sentral dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang akuntabel.

Program/kegiatan strategis yang perlu menjadi prioritas dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang untuk menjawab isu tata kelola kelembagaan adalah sebagai berikut :

- 1) Program: Penguatan Dukungan Legislasi yang Partisipatif dan Transparan.
- 2) Program: Peningkatan Kualitas Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan.
- 3) Program: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Internal Sekretariat DPRD.

2.2.3. Penentuan Isu-isu Strategis Sekretariat DPRD Kota Semarang

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan terhadap RPJMD Kota Semarang, dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kota Semarang sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Rumusan Isu Strategis Sekretariat DPRD

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Target			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan Nilai SAKIP Kota Semarang	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Manajemen pemerintahan perlu ditingkatkan	Perlunya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, demokrasi dan bertanggung jawab	Perkembangan Teknologi dan tata kelola keuangan global	Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	- Peningkatan teknis penyusunan produk hukum daerah - Peningkatan kelembagaan bagian perencanaan dan keuangan - Peningkatan kelembagaan bagian umum - Peningkatan komunikasi dan hubungan masyarakat



RENCANA STRATEGIS

Sekretariat DPRD **Kota Semarang**

TAHUN 2025-2029

I PENDAHULUAN

II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

V PENUTUP

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Kota Semarang tahun 2025 -2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan / urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode 2021-2026 visi dan misi Sekretariat DPRD sesuai dengan visi dan misi RPJMD dan fungsi Sekretariat DPRD

3.1. Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dan perencanaan strategis, tujuan dan sasaran Pembangunan Sekretariat DPRD Kota Semarang di tetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sesuai gambaran tentang kontribusi Sekretariat DPRD sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun kedepan. *Impact* tersebut harus memberi ultimate goal dan keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksanaan pembangunan Sekretariat DPRD Kota Semarang. Adapun tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Semarang periode 2025-2029 adalah sebagai berikut

"Meningkatnya Kapasitas Kinerja Anggota DPRD"

Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, maka ditetapkan indikator tujuan dari Sekretariat DPRD Kota Semarang, yaitu "Persentase Raperda menjadi Perda". Indikator ini diukur dari prosentase Raperda yang diusulkan dan telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Dalam mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya efektivitas dukungan penguatan kapasitas kelembagaan DPRD
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD

Indikator sasaran “Meningkatnya efektivitas dukungan penguatan kapasitas kelembagaan DPRD” yaitu “Persentase Raperda yang disetujui DPRD. Indikator sasaran “Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD” yaitu “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat DPRD” dan “Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat DPRD”.

Indikator Persentase Raperda yang disetujui DPRD diukur dari persentase capaian Jumlah Raperda yang disetujui untuk dibahas oleh DPRD Kota Semarang. Indikator Nilai AKIP Sekretariat DPRD diukur dari komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi dan Capaian Kinerja sedangkan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat DPRD diukur dengan penilaian sikap, pendapat, dan persepsi masyarakat terhadap pelayanan sekretariat DPRD. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat DPRD merupakan ukuran kuantitatif terhadap tingkat kepuasan pengguna layanan (anggota DPRD, staf ahli, maupun masyarakat) terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD. Indeks ini mencerminkan persepsi penerima layanan atas kinerja Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan administratif, teknis, dan fasilitatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Adapun Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sasaran RPJMD: Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Masyarakat											
	Meningkatnya kapasitas kinerja Anggota DPRD		Persentase Raperda menjadi Perda	Persen	88,50%	88,90%	89,30%	89,50%	89,75%	89,80%	
		Meningkatnya efektivitas dukungan penguatan kapasitas kelembagaan DPRD	Persentase Raperda yang disetujui DPRD	Persen	80%	82%	83%	84%	85%	86%	
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat DPRD	Angka	79,50	80,35	81,55	82,15	83,45	84,77	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat DPRD	Angka	94,50	95,60	95,75	96,25	96,5	96,75	

3.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Sekretariat DPRD mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Sekretariat DPRD dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. 2 Tahapan Strategi Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Melakukan pembenahan fundamental pada proses kerja internal dan memulai digitalisasi untuk efisiensi dasar	Mengimplemen tasikan sistem informasi terintegrasi dan meningkatkan kapasitas SDM untuk memanfaatkannya	Mengintegrasikan sistem internal dengan eksternal dan memperkuat dukungan keahlian (substantif) kepada Anggota DPRD	Memanfaatkan data dan teknologi untuk mengoptimalkan kinerja layanan serta meningkatkan transparansi dan partisipasi publik	Memastikan semua sistem dan perbaikan yang telah dilakukan menjadi budaya kerja yang permanen dan berkelanjutan

3.2.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Sekretariat DPRD agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Sekretariat DPRD merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Sekretariat DPRD. Arah kebijakan Sekretariat DPRD Kota Semarang tahun 2025 – 2029 ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONAL ISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 7 : Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualita, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas	• Reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan bebas korupsi. • Digitalisasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan. • Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan. • Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan dan sistem merit. • Pengembangan kota cerdas untuk pengelolaan kota berbasis data	• Peningkatan penyelenggaraan persidangan • Peningkatan kualitas kajian hukum dan perundang-undangan • Peningkatan kualitas risalah • Peningkatan kinerja penatausahaan keuangan • Peningkatan kinerja perencanaan keuangan • Peningkatan kinerja evaluasi dan pelaporan • Peningkatan kinerja tata usaha dan kepegawaian • Peningkatan kinerja rumah tangga • Peningkatan kinerja pengelolaan Aset dan BMD • Peningkatan kinerja publikasi dan dokumentasi • Peningkatan kinerja keprotokolan • Peningkatan kualitas kinerja pemberitaan	



RENCANA STRATEGIS

Sekretariat DPRD Kota Semarang

TAHUN 2025-2029

I PENDAHULUAN

II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

V PENUTUP

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Sekretariat DPRD untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun *cascading* kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:.

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sekretariat DPRD

NSPK dan SASARAN RPJMD Yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Sasaran RPJMD : Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya kapasitas kinerja Anggota DPRD				Persentase Raperda menjadi Perda		Sekretaris DPRD
		Meningkatnya efektivitas dukungan penguatan kapasitas kelembagaan DPRD			Persentase Raperda yang disetujui DPRD		Sekretaris DPRD
			Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan perundang-undangan dalam mendukung kinerja DPRD		Nilai kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Persidangan dan Perundangan-undangan	4.02.02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
				Meningkatnya kualitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda yang dibahas	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Subkoordinator Hukum dan Perundang-undangan
				Meningkatnya kualitas pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah	4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Staf Persidangan dan Perundang-undangan

				Meningkatnya kualitas kajian perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Staf Persidangan dan Perundang-undangan
				Meningkatnya kualitas peningkatan Kapasitas DPRD	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Subkoordinator Persidangan
				Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen hasil Pendalaman Tugas DPRD	4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Staf Persidangan dan Perundang-undangan
				Meningkatnya kualitas kelompok pakar dan tim ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Staf Persidangan dan Perundang-undangan
				Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tugas DPRD	Persentase terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Subkoordinator Risalah
				Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Staf Persidangan dan Perundang-undangan
			Meningkatnya kualitas layanan keprotokolan dan kehumasan dalam mendukung kinerja DPRD		Nilai kepuasan anggota DPRD terhadap layanan keprotokolan dan kehumasan	4.02.02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Subkoordinator Pemberitaan

				Terlaksananya kegiatan hubungan masyarakat sesuai ketentuan	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Staf Hubungan Masyarakat
				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan publikasi dan dokumentasi DPRD	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Subkoordinator Peliputan dan Dokumentasi
				Terlaksananya kegiatan publikasi dan dokumentasi DPRD sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Staf Hubungan Masyarakat
				Terlaksananya fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Kasubbag Protokol
				Terlaksananya kegiatan fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas pimpinan DPRD	4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Staf Hubungan Masyarakat
			Meningkatnya kualitas layanan penyerapan aspirasi masyarakat		Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	4.02.02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
				Meningkatnya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase hasil dokumen aspirasi masyarakat yang diusulkan	4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan
				Tersusunnya pokok-pokok pikiran DPRD	Jumlah dokumen Pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Staf Perencanaan Evaluasi dan Keuangan
				Meningkatnya kualitas pelaksanaan reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	Staf Perencanaan Evaluasi dan Keuangan

		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat DPRD		Sekretaris DPRD
					Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat DPRD		Sekretaris DPRD
			Terwujudnya perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD yang berkualitas		Persentase Perencanaan, Pelaporan kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD yang berkualitas	4.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subkoordinator Program dan Anggaran
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Staf Perencanaan Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Staf Perencanaan Evaluasi dan Keuangan

				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Staf Perencanaan Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Staf Perencanaan Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Staf Perencanaan Evaluasi dan Keuangan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Staf Perencanaan Evaluasi dan Keuangan
				Tersedianya pelaporan kinerja Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase pelaporan kinerja sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan

				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Staf Perencanaan Evaluasi dan Keuangan
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubbag Penatausahaan Keuangan
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Staf Penatausahaan Keuangan
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Staf Penatausahaan Keuangan
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Staf Penatausahaan Keuangan

				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Staf Penatausahaan Keuangan
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Staf Penatausahaan Keuangan
				Terwujudnya tertib layanan Keuangan DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase layanan Keuangan DPRD yang sesuai peraturan perundangan	4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kasubbag Penatausahaan Keuangan
				Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Staf Perencanaan Evaluasi dan Keuangan
			Terwujudnya pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat DPRD yang berkualitas		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian sekretariat DPRD	4.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bagian Umum
				Terwujudnya tertib administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kasubbag Perlengkapan dan BMD

				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Staf Perlengkapan dan BMD
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian yang Berjalan Baik	4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Staf Tata Usaha dan Kepegawaian
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Staf Tata Usaha dan Kepegawaian
				Terpenuhinya penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Sarpras yang Berjalan Baik	4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubbag Perlengkapan dan BMD
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Staf Perlengkapan dan BMD
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Staf Perlengkapan dan BMD

				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Staf Perlengkapan dan BMD
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum yang Berjalan Baik	4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Staf Tata Usaha dan Kepegawaian
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Staf Tata Usaha dan Kepegawaian
				Terpenuhinya pelayanan administrasi pendukung untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi pendukung yang Berjalan Baik	4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubbag Rumah Tangga
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Staf Rumah Tangga

				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (OPD)	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (OPD)	4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubbag Perlengkapan dan BMD
				Tersedianya kendaraan dinas jabatan yang berkualitas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas jabatan yang Disediakan	4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Staf Perlengkapan dan BMD
				Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berkualitas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staf Perlengkapan dan BMD
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Perlengkapan dan BMD
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Sekretariat DPRD	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Sekretariat DPRD yang selesai ditindaklanjuti	4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Rumah Tangga
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Staf Rumah Tangga
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Staf Rumah Tangga

				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Staf Rumah Tangga
				Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Gedung untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD	Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Gedung kantor Sekretariat DPRD sesuai ketentuan	4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Rumah Tangga
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Staf Rumah Tangga
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staf Rumah Tangga
				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Staf Rumah Tangga
				Terpeliharanya Sarana Prasana Kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD	Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana kantor Sekretariat DPRD sesuai ketentuan	4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Perlengkapan dan BMD

				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Staf Perlengkapan dan BMD
				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Staf Perlengkapan dan BMD
				Terwujudnya tertib layanan Kesejahteraan DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase layanan Kesejahteraan DPRD yang sesuai peraturan perundangan	4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
				Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Staf Tata Usaha dan Kepegawaian
				Terlaksananya medical checkup DPRD	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up	4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Staf Tata Usaha dan Kepegawaian
				Meningkatnya Kualitas Layanan administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD yang sesuai peraturan perundangan	4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Kasubbag Rumah Tangga
				Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Ketua DPRD	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan	4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Staf Rumah Tangga

Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Semarang mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah yaitu Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dan Penguatan kelembagaan pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan substansinya. Bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. 2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung program Prioritas Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025-2029

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan yang berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	
2	Penguatan kelembagaan pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan substansinya		4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Tugas DPRD 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Semarang terdapat Tabel 4.3 berikut

Tabel 4. 3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Semarang

BIDANG URUSAN/PROGRAM/O UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.02 SEKRETERIAT DPRD				136.219.910.866		151.194.751.589		157.712.499.302		158.909.716.942		161.733.705.417
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				61.521.335.455		68.030.023.592		70.862.907.628		71.383.268.171		72.610.690.928
Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan perundang- undangan dalam mendukung kinerja DPRD	Nilai kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Persidangan dan Perundangan- undangan		95,30	45.564.871.608	95,75	50.385.435.679	96,25	52.483.569.545	96,5	52.868.966.922	96,75	53.778.039.521
4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				19.268.642.910		21.307.181.030		22.194.447.707		22.357.425.988		22.741.858.001
Meningkatnya kualitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda yang dibahas	58,69 %	80,00 %	19.268.642.910	80,00 %	21.307.181.030	80,00 %	22.194.447.707	80,00 %	22.357.425.988	80,00 %	22.741.858.001
4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				17.372.695.550		19.210.650.734		20.010.614.381		20.157.556.336		20.504.161.976
Meningkatnya kualitas pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	58,69 %	10 doku men	17.372.695.550	10 doku men	19.210.650.734	10 doku men	20.010.614.381	10 doku men	20.157.556.336	10 doku men	20.504.161.976

BIDANG URUSAN/PROGRAM/O UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan				1.895.947.360		2.096.530.296		2.183.833.326		2.199.869.652		2.237.696.025
Meningkatnya kualitas kajian perundang- undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- undangan	6 doku men	8 doku men	1.895.947.360	8 doku men	2.096.530.296	8 doku men	2.183.833.326	8 doku men	2.199.869.652	8 doku men	2.237.696.025
4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD				2.296.228.698		2.539.159.648		2.644.894.506		2.664.316.496		2.710.128.951
Meningkatnya kualitas peningkatan Kapasitas DPRD	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD	67,50 %	95,60 %	2.296.228.698	95,75 %	2.539.159.648	96,25 %	2.644.894.506	96,25 %	2.664.316.496	96,25 %	2.710.128.951
4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD				901.723.098		997.121.457		1.038.643.263		1.046.270.229		1.064.260.662
Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen hasil Pendalaman Tugas DPRD	100,0 0%	1 doku men	901.723.098	1 doku men	997.121.457	1 doku men	1.038.643.263	1 doku men	1.046.270.229	1 doku men	1.064.260.662
4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				1.394.505.600		1.542.038.192		1.606.251.243		1.618.046.268		1.645.868.289
Meningkatnya kualitas kelompok pakar dan tim ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	20 orang	20 orang	1.394.505.600	20 orang	1.542.038.192	20 orang	1.606.251.243	20 orang	1.618.046.268	20 orang	1.645.868.289
4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD				24.000.000.000		26.539.095.001		27.644.227.332		27.847.224.437		28.326.052.570
Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tugas DPRD	Persentase terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	52,18 %	92,00 %	24.000.000.000	93,00 %	26.539.095.001	93,50 %	27.644.227.332	93,50 %	27.847.224.437	93,50 %	28.326.052.570

BIDANG URUSAN/PROGRAM/O UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				24.000.000.000		26.539.095.001		27.644.227.332		27.847.224.437		28.326.052.570
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 doku men	12 doku men	24.000.000.000	12 doku men	26.539.095.001	12 doku men	27.644.227.332	12 doku men	27.847.224.437	12 doku men	28.326.052.570
Meningkatnya kualitas layanan keprotokolan dan kehumasan dalam mendukung kinerja DPRD	Nilai kepuasan anggota DPRD terhadap layanan keprotokolan dan kehumasan		95,3	7.154.199.747	95,75	7.911.082.781	96,25	8.240.513.508	96,5	8.301.025.251	96,75	8.443.759.922
4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD				4.080.130.640		4.511.790.611		4.699.669.123		4.734.179.736		4.815.583.125
Meningkatnya kualitas peningkatan Kapasitas DPRD	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD	67,50 %	95,60 %	4.080.130.640	95,75 %	4.511.790.611	96,25 %	4.699.669.123	96,25 %	4.734.179.736	96,25 %	4.815.583.125
4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				3.080.130.640		3.405.994.986		3.547.826.318		3.573.878.718		3.635.330.935
Terlaksananya kegiatan hubungan masyarakat sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 doku men	12 doku men	3.080.130.640	12 doku men	3.405.994.986	12 doku men	3.547.826.318	12 doku men	3.573.878.718	12 doku men	3.635.330.935
4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1.000.000.000		1.105.795.625		1.151.842.805		1.160.301.018		1.180.252.190
Terlaksananya kegiatan publikasi dan dokumentasi DPRD sesuai ketentuan.	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 doku men	12 doku men	1.000.000.000	12 doku men	1.105.795.625	12 doku men	1.151.842.805	12 doku men	1.160.301.018	12 doku men	1.180.252.190

BIDANG URUSAN/PROGRAM/O UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD				3.074.069.107		3.399.292.170		3.540.844.384		3.566.845.515		3.628.176.797
Terlaksananya fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	52,18 %	92,00 %	3.074.069.107	93,00 %	3.399.292.170	93,50 %	3.540.844.384	93,50 %	3.566.845.515	93,50 %	3.628.176.797
4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				3.074.069.107		3.399.292.170		3.540.844.384		3.566.845.515		3.628.176.797
Terlaksananya fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 doku men	12 doku men	3.074.069.107	12 doku men	3.399.292.170	12 doku men	3.540.844.384	12 doku men	3.566.845.515	12 doku men	3.628.176.797
Meningkatnya kualitas layanan penyerapan aspirasi masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti		81	8.802.264.100	82,25	9.733.505.132	83,25	10.138.824.576	84	10.213.275.998	85	10.388.891.485
4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				8.802.264.100		9.733.505.132		10.138.824.576		10.213.275.998		10.388.891.485
Meningkatnya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase hasil dokumen aspirasi masyarakat yang diusulkan	90,62 %	85,50 %	8.802.264.100	86,00 %	9.733.505.132	86,50 %	10.138.824.576	86,50 %	10.213.275.998	86,50 %	10.388.891.485
4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD				145.857.600		161.288.696		168.005.027		169.238.722		172.148.752
Tersusunnya pokok-pokok pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok DPRD yang disusun	-	1 doku men	145.857.600	1 doku men	161.288.696	1 doku men	168.005.027	1 doku men	169.238.722	1 doku men	172.148.752
4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses				8.656.406.500		9.572.216.436		9.970.819.548		10.044.037.276		10.216.742.733

BIDANG URUSAN/PROGRAM/O UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
Meningkatnya kualitas pelaksanaan reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150 doku men	150 doku men	8.656.406.500	150 doku men	9.572.216.436	150 doku men	9.970.819.548	150 doku men	10.044.037.276	150 doku men	10.216.742.733
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				74.698.575.411		82.730.192.356		86.395.802.623		87.069.123.142		88.657.346.806
Terwujudnya perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD yang berkualitas	Persentase Perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD yang berkualitas		95	57.989.087.169	95,50	64.561.427.506	95,50	67.422.015.942	95,50	67.947.465.389	95,50	69.186.891.819
4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				81.105.620		90.297.931		94.298.853		95.033.765		96.767.272
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	88,58 %	100,0 0%	81.105.620	100,0 0%	90.297.931	100,0 0%	94.298.853	100,0 0%	95.033.765	100,0 0%	96.767.272
4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8.496.000		9.458.916		9.878.021		9.955.005		10.136.594
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 doku men	3 doku men	8.496.000	3 doku men	9.458.916	3 doku men	9.878.021	3 doku men	9.955.005	3 doku men	10.136.594

BIDANG URUSAN/PROGRAM/O UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.852.600		6.515.919		6.804.627		6.857.658		6.982.748
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 doku men	1 doku men	5.852.600	1 doku men	6.515.919	1 doku men	6.804.627	1 doku men	6.857.658	1 doku men	6.982.748
4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.852.600		6.515.919		6.804.627		6.857.658		6.982.748
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 doku men	1 doku men	5.852.600	1 doku men	6.515.919	1 doku men	6.804.627	1 doku men	6.857.658	1 doku men	6.982.748
4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				9.806.200		10.917.611		11.401.348		11.490.204		11.699.796
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 doku men	1 doku men	9.806.200	1 doku men	10.917.611	1 doku men	11.401.348	1 doku men	11.490.204	1 doku men	11.699.796

BIDANG URUSAN/PROGRAM/O UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				5.852.600		6.515.919		6.804.627		6.857.658		6.982.748
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 doku men	1 doku men	5.852.600	1 doku men	6.515.919	1 doku men	6.804.627	1 doku men	6.857.658	1 doku men	6.982.748
4.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620		50.373.647		52.605.603		53.015.582		53.982.637
Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 doku men	1 doku men	45.245.620	1 doku men	50.373.647	1 doku men	52.605.603	1 doku men	53.015.582	1 doku men	53.982.637
4.02.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.271.000		22.568.465		23.568.429		23.752.108		24.185.369
Tersedianya pelaporan kinerja Sekertariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase pelaporan kinerja sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	88,58 %	100,0 0%	20.271.000	100,0 0%	22.568.465	100,0 0%	23.568.429	100,0 0%	23.752.108	100,0 0%	24.185.369
4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat daerah				20.271.000		22.568.465		23.568.429		23.752.108		24.185.369

BIDANG URUSAN/PROGRAM/O UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	6 laporan	20.271.000	6 laporan	22.568.465	6 laporan	23.568.429	6 laporan	23.752.108	6 laporan	24.185.369
4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.717.034.549		9.705.001.778		10.135.011.103		10.213.997.706		10.400.310.744
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	97,31 %	100,0 0%	8.717.034.549	100,0 0%	9.705.001.778	100,0 0%	10.135.011.103	100,0 0%	10.213.997.706	100,0 0%	10.400.310.744
4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.370.575.618		9.319.276.045		9.732.194.630		9.808.041.907		9.986.949.925
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang	50 orang	8.370.575.618	50 orang	9.319.276.045	50 orang	9.732.194.630	50 orang	9.808.041.907	50 orang	9.986.949.925
4.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				338.310.431		376.653.702		393.342.478		396.407.970		403.638.828
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	338.310.431	12 dokumen	376.653.702	12 dokumen	393.342.478	12 dokumen	396.407.970	12 dokumen	403.638.828
4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.285.500		2.544.533		2.657.276		2.677.985		2.726.834
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	1 laporan	1 laporan	2.285.500	1 laporan	2.544.533	1 laporan	2.657.276	1 laporan	2.677.985	1 laporan	2.726.834

BIDANG URUSAN/PROGRAM/O UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.577.500		3.982.965		4.159.442		4.191.859		4.268.322
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ n/Semesteran SKPD	1 lapora n	1 lapor an	3.577.500	1 lapora n	3.982.965	1 lapora n	4.159.442	1 lapora n	4.191.859	1 lapora n	4.268.322
4.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2.285.500		2.544.533		2.657.276		2.677.985		2.726.834
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 lapora n	1 lapor an	2.285.500	1 lapora n	2.544.533	1 lapora n	2.657.276	1 lapora n	2.677.985	1 lapora n	2.726.834
4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				49.170.676.000		54.743.559.331		57.169.137.556		57.614.681.810		58.665.628.434

BIDANG URUSAN/PROGRAM/O UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
Terwujudnya tertib layanan Keuangan DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase layanan Keuangan DPRD yang sesuai peraturan perundangan	92,27 %	95,50 %	49.170.676.000	95,50 %	54.743.559.331	95,50 %	57.169.137.556	95,50 %	57.614.681.810	95,50 %	58.665.628.434
4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				49.170.676.000		54.743.559.331		57.169.137.556		57.614.681.810		58.665.628.434
Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang	50 orang	49.170.676.000	50 orang	54.743.559.331	50 orang	57.169.137.556	50 orang	57.614.681.810	50 orang	58.665.628.434
Terwujudnya pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat DPRD yang berkualitas	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat DPRD		95,50	16.709.488.242	95,50	18.168.764.850	95,50	18.973.786.682	95,50	19.121.657.753	95,50	19.470.454.987
4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				70.000.000		77.933.628		81.386.712		82.020.994		83.517.135
Terwujudnya tertib administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase Kegiatan Administrasi BMD yang Berjalan Baik	74,88 %	100,0 0%	70.000.000	100,0 0%	77.933.628	100,0 0%	81.386.712	100,0 0%	82.020.994	100,0 0%	83.517.135
4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				70.000.000		77.933.628		81.386.712		82.020.994		83.517.135
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan	1 doku men	1 doku men	70.000.000	1 doku men	77.933.628	1 doku men	81.386.712	1 doku men	82.020.994	1 doku men	83.517.135

BIDANG URUSAN/PROGRAM/O UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
	Barang Milik Daerah SKPD											
4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				540.752.000		602.039.500		628.714.673		633.614.523		645.172.255
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian yang Berjalan Baik	72,97 %	100,0 0%	540.752.000	100,0 0%	602.039.500	100,0 0%	628.714.673	100,0 0%	633.614.523	100,0 0%	645.172.255
4.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				7.752.000		8.630.593		9.012.997		9.083.239		9.248.926
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 doku men	12 doku men	7.752.000	12 doku men	8.630.593	6 lapora n	9.012.997	6 lapora n	9.083.239	6 lapora n	9.248.926
4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				533.000.000		593.408.907		619.701.676		624.531.284		635.923.329

BIDANG URUSAN/PROGRAM/O UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	50 orang	533.000.000	50 orang	593.408.907	50 orang	619.701.676	50 orang	624.531.284	50 orang	635.923.329
4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.988.463.654		6.667.181.377		6.962.590.923		7.016.853.459		7.144.847.543
Terpenuhinya penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Sarana prasarana yang Berjalan Baik	88,61 %	100,0 0%	1.884.992.904	100,0 0%	2.098.633.358	100,0 0%	2.191.619.628	100,0 0%	2.208.699.884	100,0 0%	2.248.988.672
4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				750.000.000		835.003.153		872.000.482		878.796.365		894.826.447
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	750.000.000	12 paket	835.003.153	12 paket	872.000.482	12 paket	878.796.365	12 paket	894.826.447
4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				294.292.781		327.647.200		342.164.596		344.831.235		351.121.285
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	294.292.781	12 paket	327.647.200	12 paket	342.164.596	12 paket	344.831.235	12 paket	351.121.285
4.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				840.700.123		935.983.005		977.454.550		985.072.283		1.003.040.939

BIDANG URUSAN/PROGRAM/O UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 doku men	1 doku men	840.700.123	1 doku men	935.983.005	1 doku men	977.454.550	1 doku men	985.072.283	1 doku men	1.003.040.939
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang Berjalan Baik	88,61 %	100%	1.303.470.750	100%	1.451.202.915	100%	1.515.502.830	100%	1.527.313.810	100%	1.555.173.467
4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				156.470.750		174.204.759		181.923.426		183.341.235		186.685.554
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 doku men	1 doku men	156.470.750	1 doku men	174.204.759	1 doku men	181.923.426	1 doku men	183.341.235	1 doku men	186.685.554
4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.147.000.000		1.276.998.155		1.333.579.404		1.343.972.575		1.368.487.914
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lapora n	12 lapor an	1.147.000.000	12 lapora n	1.276.998.155	12 lapora n	1.333.579.404	12 lapora n	1.343.972.575	12 lapora n	1.368.487.914

BIDANG URUSAN/PROGRAM/O UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
Terpenuhinya pelayanan administrasi pendukung untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD	Persentase Pelaksanaan Administrasi pendukung yang Berjalan Baik	88,61 %	100%	2.800.000.000	100%	3.117.345.105	100%	3.255.468.466	100%	3.280.839.764	100%	3.340.685.404
4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.800.000.000		3.117.345.105		3.255.468.466		3.280.839.764		3.340.685.404
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 lapora n	12 lapor an	2.800.000.000	12 lapora n	3.117.345.105	12 lapora n	3.255.468.466	12 lapora n	3.280.839.764	12 lapora n	3.340.685.404
4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.597.348.615		4.005.063.248		4.182.519.634		4.215.115.851		4.292.003.575
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (OPD)	Persentase pengadaan BMD Sekretariat DPRD	90,13 %	100,0 0%	3.597.348.615	100,0 0%	4.005.063.248	100,0 0%	4.182.519.634	100,0 0%	4.215.115.851	100,0 0%	4.292.003.575
4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		700.000.000		731.015.608		2.493.554.833		750.151.075
Tersedianya kendaraan dinas jabatan yang berkualitas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas jabatan yang Disediakan	-	0 unit	-	1 unit	700.000.000	1 unit	731.015.608	4 unit	2.493.554.833	2 unit	750.151.075
4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.756.839.662		2.369.293.080		2.474.271.744		736.712.734		2.539.039.646

BIDANG URUSAN/PROGRAM/O UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berkualitas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	3 unit	2.756.839.662	3 unit	2.369.293.080	3 unit	2.474.271.744	3 unit	736.712.734	3 unit	2.539.039.646
4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				840.508.953		935.770.168		977.232.283		984.848.284		1.002.812.854
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 unit	55 unit	840.508.953	55 unit	935.770.168	55 unit	977.232.283	55 unit	984.848.284	55 unit	1.002.812.854
4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.676.251.576		4.092.908.877		4.274.257.528		4.307.568.698		4.386.142.850
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Sekretariat DPRD	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	96,99 %	100,0 0%	3.676.251.576	100,0 0%	4.092.908.877	100,0 0%	4.274.257.528	100,0 0%	4.307.568.698	100,0 0%	4.386.142.850
4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				99.135.936		110.371.759		115.262.112		116.160.400		118.279.277
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lapora n	12 lapor an	99.135.936	12 lapora n	110.371.759	12 lapora n	115.262.112	12 lapora n	116.160.400	12 lapora n	118.279.277
4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				405.000.000		450.901.703		470.880.260		474.550.037		483.206.282

BIDANG URUSAN/PROGRAM/O UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	12 lapora n	12 lapor an	405.000.000	12 lapora n	450.901.703	12 lapora n	470.880.260	12 lapora n	474.550.037	12 lapora n	483.206.282
4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.172.115.640		3.531.635.415		3.688.115.156		3.716.858.260		3.784.657.292
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lapora n	12 lapor an	3.172.115.640	12 lapora n	3.531.635.415	12 lapora n	3.688.115.156	12 lapora n	3.716.858.260	12 lapora n	3.784.657.292
4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.577.872.397		1.756.704.569		1.834.540.654		1.848.838.037		1.882.562.602
Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Gedung untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD	Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Gedung kantor Sekretariat DPRD sesuai ketentuan	76,51 %	92,50 %	1.187.572.397	92,50 %	1.322.168.928	92,50 %	1.380.751.603	92,50 %	1.391.512.408	92,50 %	1.416.894.919
4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				344.025.597		383.016.611		399.987.315		403.104.592		410.457.604

BIDANG URUSAN/PROGRAM/O UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 unit	9 unit	344.025.597	9 unit	383.016.611	9 unit	399.987.315	9 unit	403.104.592	9 unit	410.457.604
4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				643.546.800		716.484.810		748.230.826		754.062.118		767.816.929
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 unit	39 unit	643.546.800	39 unit	716.484.810	39 unit	748.230.826	39 unit	754.062.118	39 unit	767.816.929
4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		222.667.507		232.533.462		234.345.697		238.620.386
Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 unit	100 unit	200.000.000	100 unit	222.667.507	100 unit	232.533.462	100 unit	234.345.697	100 unit	238.620.386

BIDANG URUSAN/PROGRAM/O UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
Terpeliharanya Sarana Prasana Kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD	Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana kantor Sekretariat DPRD sesuai ketentuan	76,25 %	92,50 %	390.300.000	92,50 %	434.535.641	92,50 %	453.789.051	92,50 %	457.325.629	92,50 %	465.667.683
4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200.000.000		222.667.507		232.533.462		234.345.697		238.620.386
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	248 unit	248 unit	200.000.000	248 unit	222.667.507	248 unit	232.533.462	248 unit	234.345.697	248 unit	238.620.386
4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				190.300.000		211.868.133		221.255.589		222.979.931		227.047.297
Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	1 unit	1 unit	190.300.000	1 unit	211.868.133	1 unit	221.255.589	1 unit	222.979.931	1 unit	227.047.297
4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				1.257.000.000		1.399.465.285		1.461.472.808		1.472.862.709		1.499.729.126
Terwujudnya tertib layanan Kesejahteraan DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase layanan Kesejahteraan DPRD yang sesuai peraturan perundangan	92,27 %	95,50 %	1.257.000.000	95,50 %	1.399.465.285	95,50 %	1.461.472.808	95,50 %	1.472.862.709	95,50 %	1.499.729.126
4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				1.107.000.000		1.232.464.654		1.287.072.711		1.297.103.435		1.320.763.836

BIDANG URUSAN/PROGRAM/O UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 paket	6 paket	1.107.000.000	6 paket	1.232.464.654	6 paket	1.287.072.711	6 paket	1.297.103.435	6 paket	1.320.763.836
4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				150.000.000		167.000.631		174.400.096		175.759.273		178.965.289
Terlaksananya medical checkup DPRD	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check up DPRD	50 orang	50 orang	150.000.000	50 orang	167.000.631	50 orang	174.400.096	50 orang	175.759.273	50 orang	178.965.289
4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD				1.800.000		2.004.008		2.092.801		2.109.111		2.147.583
Meningkatnya Kualitas Layanan administrasi DPRD	Prosentase ketertiban pelayanan administrasi DPRD	75,86 %	100,0 0%	1.800.000	100,0 0%	2.004.008	100,0 0%	2.092.801	100,0 0%	2.109.111	100,0 0%	2.147.583
4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				1.800.000		2.004.008		2.092.801		2.109.111		2.147.583
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Ketua DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 paket	1 paket	1.800.000	1 paket	2.004.008	1 paket	2.092.801	1 paket	2.109.111	1 paket	2.147.583

Sumber : Sekretariat DPRD 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama entitas. *Output* entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indikator Tujuan : Prosentase Raperda Menjadi Perda	Persen	88,50	88,90	89,30	89,50	89,75	89,80	

2	Indikator Sasaran 1 : Persentase Raperda yang disetujui DPRD	Persen	80	82	83	84	85	86	
3	Indikator Sasaran 2 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat DPRD	Angka	79,50	80,35	81,55	82,15	83,45	84,77	
4	Indikator Sasaran 3 : Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat DPRD	Angka	94,50	95,60	95,75	96,25	96,5	96,75	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran operasional atau taktis untuk memantau capaian kegiatan dan output yang mendukung pencapaian IKU.

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD dalam fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Persen	100	100	100	100	100	100	



RENCANA STRATEGIS

Sekretariat DPRD **Kota Semarang**

TAHUN 2025-2029

I **PENDAHULUAN**

II **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG**

III **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

IV **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

V **PENUTUP**

BAB V PENUTUP

Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Sekretariat DPRD ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD

Permasalahan meningkatnya kapasitas kinerja DPRD sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Sekretariat DPRD. Oleh karena itu, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdaya guna dan berhasil guna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggung jawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Sekretariat DPRD. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

Sebagai penutup, Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Sekretariat DPRD beserta para pemangku kepentingan dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kapasitas Anggota DPRD, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Semarang.

Semarang, 2025
Sekretaris DPRD Kota Semarang R .



MOCHIMRON, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda/(IV-c)
NIP 196701101986031003